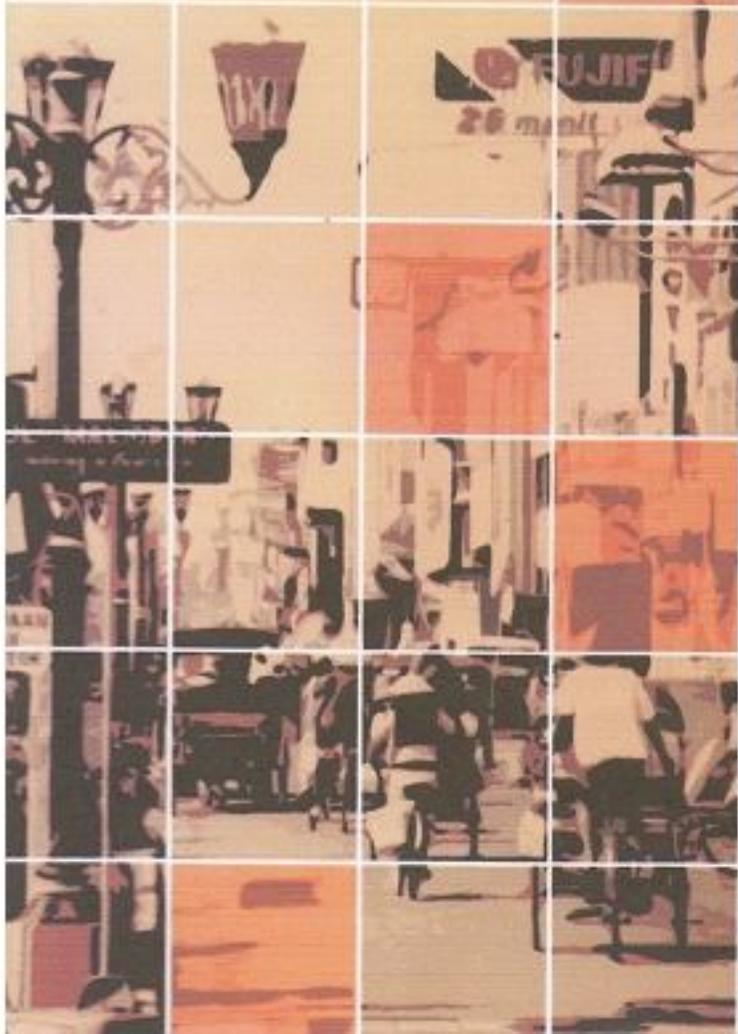


Urban Design
2004

ISSN 1693-8895



**1st International Seminar,
National Symposium,
Exhibition and Workshop
in Urban Design 2004**



proceedings

managing conflicts in public
spaces through urban design

volume 2



1st International, National Symposium,
Exhibition and Workshop in Urban Design 2004

Managing Conflicts in Public Spaces
Through Urban Design

KEDANSTIAAN

Polisberg

Rektor Universitas Gadjah Mada
Prof. Dr. Sofian Effendi, MPiA

Direktor Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Prof. Dr. Mulyadi, Apt.

Perasehat

Ir. Adi Utomo Haroko, M.Arch.
Ir. Isaputra, M.Eng, Ph.D
Ir. Iman Djokomono, M.Arch.
Ir. Jazmika Adi Suryabrata, M.Sc, Ph.D
Ir. Laksana Triastanto Adhikari, M.Arch., Ph.D
Ir. T. Yoyok Wahyu Sabroto, M.Eng, Ph. D
Dr. Ir. Budi Prayitno, M.Eng, Ph.D

Pemanggang Jarak

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP, M.Sc., Ph.D

Ketua Umum : Ir. Andi Kumala Sakti, MT
Ketua Pelaksana : Dwi Endah Kusumaningsih, ST., MT
Sekretaris : Arif Takwa Setiawan, ST

Bendahara : Muhammad Nur Cholish, Arnd
Wakil Bendahara : Anggraeni Hermalia, ST

KESEKRETARIATAN

Koordinator : Niken Siswandini
Kharumanisa
Dinar Pratama Aji

USAHA DANA

Koordinator : Ir. Ferry Yushyan
Harry Kurniawan, ST

PAMERAN

Koordinator : Muhammad Iqbal Apeng, ST., MT
Agas Nur Wachrud, ST
Fadli Ven Idas, ST
Zulkarnain
Dedi Prihandoko

SEMINAR

Koordinator : Ir. Poerwadi
Permonangan Masung, ST., MT

EKSKURSI

Koordinator : Ir. Hena T. Sudewo
Danang Yulisaksono, ST
Dimas Dora
Ade Maulani Sabri, ST

HUMAS/PUBLIKASI

Koordinator : Ari Agung Nugroho, ST
Reina Savitri
Hario Sanekko, ST

ESCORT

Koordinator : Suryo Pradipta, ST
Euseby Wahyudi, ST
Bayu Jurniko, ST
Sinta Prima
Aryo Pentana Kusuma

ISSN 1693-8895

Volume 11

Editor : Budi Prayitno, Poerwadi,
Arif Takwa Setiawan, Dinar Pratama Aji
Penerbit : Magister Desain Kawasan Binaan Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
(MDKB Jurusan Teknik Arsitektur UGM)

KATA PENGANTAR

Proceedings Volume 2 *International Seminar and National Symposium* dengan tema *Managing Conflicts in Public Spaces Through Urban Design* yang diselenggarakan oleh Magister Desain Kawasan Binaan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (MDKB Jurusan Teknik Arsitektur UGM) ini merupakan penyempurnaan dari proceeding Volume 1 yang hanya memuat 45 judul makalah, karena keterbatasan waktu naik cetak sebelum hari penyelenggaraan.

Antusias pemakalah yang diwujudkan melalui pemasukan abstrak sangat besar. Makalah yang masuk terdiri dari 50 judul sub tema 1, tentang *Conflicts in Open Public Spaces, Squares, Streets and Pedestrians*, 20 judul sub tema 2, tentang *Conflicts in Conservation Areas* dan sub tema 3 tentang *Conflicts of Regulation and its Implementation in Urban Design*, walaupun tidak semua abstrak bisa dilanjutkan menjadi *full papers*.

Makalah-makalah yang telah masuk ke panitia penyelenggara, makalah dari *keynote speakers* saat *International Seminar* berlangsung pada hari pertama dan *National Symposium* pada hari kedua, disusun dan dirangkum menjadi buku proceedings volume 2 ini.

Panitia penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, baik pada proceeding volume 1 maupun proceeding volume 2 ini dan kami berharap masukan dari semua pihak terkait, agar karya ilmiah ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Maret 2004

Program Studi Magister Desain Kawasan Binaan
Program Pascasarjana UGM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Full Papers	
Edi Purwanto (Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District).....	1
Imam Santoso (Revitalisasi ruko Kawasan Klodjen Malang).....	17
M. Santosa (The Occupation Conflicts on Urban Pedestrians).....	25
Siti Azizah (Faktor Penyebab terjadinya Konflik pada Ruang Terbuka di Pusat Kota).....	33
Wahyu Utami (Keberadaan Pedagang Buku Bekas di Lapangan Merdeka, Medan..	39
Woerjantari Soedarsono (Conflicts in Menteng Conservation Area, Jakarta).....	47
Z. Dwita Hadi Rahmi (Alternatif Penyelesaian Konflik Penggunaan dan Strategi Pengadaan Ruang Terbuka Publik Kota).....	55
Asrul Mahjuddin (Star Walk of Shah Alam).....	69
Herry Zudianto (Konsekuensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelestarian dalam Pengelolaan dan Penataan Ruang Kota).....	73
Heru T. Sudewo (Bergesernya Fungsi dan Nilai Pedestrian di Kawasan Pusat Keramaian Kota	77
Irendra Radjawali (Pemahaman Terhadap "Pola Aktifitas Ekonomi" untuk Mengidentifikasi dan Melakukan Manajemen Konflik pada Ruang Terbuka Publik).....	83
Munichy B. Edrees (Peran TPAK dalam Pengawasan Perancangan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Indonesia).....	93
Narumi Kunihiro ("Urban Freespace in East and West-roles and characteristics of Opened for the people").....	101
Poerwadi (Karakteristik Visual Kawasan Perdagangan Pasar Kotagede).....	105
Sitthiporn Pinomruen (Conflicts of Urban Space Utilization : A Case Study of Bangkok's 3 Main Civic Spaces)	119
Sumarni Ismail (Managing Main Streets in Kuala Lumpur Through Urban Design)	127
Totok Roesmanto (Konflik Seputar Upaya Merekonstruksi dan Menata Alun-alun Semarang dan Limpung).....	133
Yan Folland (Architectural Identity and Urban Specificity When Does Formal Dimension Meet Informal Dimension or When Does History Tip Over Collective Memory)	145

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK PADA RUANG TERBUKA DI PUSAT

KOTA

Studi Kasus Sepanjang Trotoar Jalan Tunjungan Surabaya

Oleh : Siti Azizah

Staff Pengajar Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)

Email : azizahari @ yahoo.com

ABSTRACT

Open public space is an outdoor space for peoples activity with various daily activities of the city inhabitants; for taking a walk for pedestrians, social interaction, trading, etc. Referring to the definition above, (along) the pavement of Tunjungan Street is an open public space. Tunjungan Street exists in the city center of Surabaya, that connects the northern part and the southern part of Surabaya. Historically, Since the beginning of the 20-century , Tunjungan Street has been well-known as a shopping center constituting a range of big shops. Along the street there was pavement with shelters, so that it became a convenient place to take a walk for citizens in the past. Now, Tunjungan is not an interesting open space of the city. This is because the street traders in front of the northern end of it have crowded the pavement, so that they disturb the pedestrian movement and the city esthetics. The existing policy of The city government of Surabaya is less able to control the street traders' activity and the occurring conflict.

Knowing the factors that cause the conflict between the pedestrians and the street traders on the pavement of Tunjungan Street can expectedly settles the conflict, so that the elements of it are mutually supportive, and we can improve the esthetics in the downtown, revive the image of Tunjungan Street as the area for shopping and for taking a walk in an open space that constitutes peoples' pride, and as a tourism object of the city.

Some cause factors are, among others, the pavement space dominated by the street traders so that the pedestrians' movement space are narrowed, the existence of the street traders just on the northern ends of Tunjungan Street, the economic factors that cause the street traders to be increasingly growing in number and needed by the low-medium classes of society, the policy that is less able to control the street traders, the less orderly behavior of pedestrians and street traders, the lessening of environmental esthetics factors due to the display of the street traders' demonstration aids or visual display that look homely, messy, and vile.

Having seen the factors above, we can conclude that the street traders' activity in Tunjungan can not be eliminated, because of an interdependence between the street traders and pedestrians (supply-demand factor). Therefore the solution is by an arrangement along the pavement by making a pedestrian flow from north to south, by improving the environmental esthetics , by conducting an intensive mental guidance to be accustomed to having an orderly behavior or conduct and, by promoting Tunjungan as one tourism object of the city.

Keywords : Causal factors, street-traders, pedestrian

1. PENDAHULUAN

Ruang umum terbuka menurut Rustam Hakim (2003) adalah bentuk dasar dari ruang terbuka di luar bangunan yang dapat digunakan oleh setiap orang dengan bermacam kegiatan.

Sedangkan Roger Trancik (1986) mendefinisikan salah satu dari *urban space* yaitu *hard space* sebagai ruang terbuka yang tertutup perkerasan dan digunakan sebagai tempat kegiatan masyarakat umum di wilayah urban. Dari definisi diatas terlihat bahwa ruang terbuka kota adalah tempat bagi masyarakat untuk beraktifitas sehingga terjadinya konflik karena berbagai kepentingan tidak bisa dihindarkan.

Suatu konflik di ruang terbuka kota dapat diselesaikan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Pada prinsipnya, suatu penyelesaian konflik hendaknya dilakukan secara kompromistis dengan tidak merugikan kepentingan salah satu elemen.

Konflik di sepanjang sepanjang trotoar jalan Tunjungan adalah konflik antara pedestrian/ pengguna jalan dan para pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya konflik tersebut menyebabkan jalan Tunjungan yang berada di pusat kota Surabaya menjadi menurun citra dan estetikanya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik maka diharapkan dapat menyelesaikannya sehingga dapat saling mendukung antar elemen, meningkatkan estetika di pusat kota, mengembalikan citra Tunjungan sebagai kawasan belanja dan jalan-jalan di ruang terbuka yang dibanggakan masyarakat dan dapat menjadi salah satu obyek wisata kota.

2. GAMBARAN UMUM JALAN TUNJUNGAN SURABAYA

Jalan Tunjungan merupakan satu ruas jalan yang berada di pusat kota Surabaya, menghubungkan bagian utara kota dengan bagian selatan kota. Penggunaan lahan di ujung utara jalan berupa gedung pusat perbelanjaan (*Siola/ Ramayana*), gedung perbelanjaan berupa jembatan pertokoan dan pusat parkir (*Tunjungan Center*), halte bus kota, dan deretan pertokoan elektronik. Di bagian tengah didominasi oleh bangunan *show room*, kantor dan bank. Sedangkan dibagian selatan tidak ada aktifitas yang berarti karena terdiri dari bangunan beberapa toko yang telah tutup.

Secara historis, sejak pergantian abad 20 seiring dengan mulai berkembangnya perniagaan di Surabaya, banyak gedung perbelanjaan yang dikelola orang Eropa terletak di kawasan ini yang sebelumnya merupakan perumahan tradisional. Toko-toko besar yang ada menjadikan Tunjungan terkenal sebagai tempat belanja dan banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Kondisi ini didukung oleh sentralitas dan aksesibilitas yang menjadikan jalan Tunjungan menjadi kawasan komersial, Fungsi jalan Tunjungan sebagai pusat kegiatan pelayanan komersial yang memiliki pelayanan internal kota, tampak pada pertokoan yang terletak secara linier di sepanjang jalan Tunjungan. Fungsi ini didukung oleh bentuk bangunan

disepanjang jalan yang pada umumnya didepan bangunan memiliki trotoar dengan naungan (*portico*) sehingga pedestrian merasa nyaman berjalan-jalan dibawahnya.

*Tampak gedung
Jembatan Perbelanjaan
di ujung utara
Jalan Tunjungan*



*Tampak trotoar
dengan naungan,
yang memberi
kenyamanan
bagi pedestrian
dibawahnya*



Fungsi sebagai perbelanjaan yang santai ini mulai berubah sekarang dengan semakin berkurangnya masyarakat yang berjalan-jalan disana dan semakin banyaknya PKL yang memenuhi trotoar.

Karena penggunaan lahannya, saat ini pedestrian lebih banyak berada di ujung utara jalan sehingga PKL juga banyak di ujung utara ini. Konflik ini semakin terlihat nyata pada hari-hari libur, dimana PKL dan pedestrian semakin banyak.

Jenis dagangan PKL ini berupa kaset VCD, asesoris, topi, baju/ kaos, dsb. Para PKL ini menggelar dagangannya memenuhi sebagian besar trotoar yang ada sehingga ruang gerak pedestrian terganggu. Dari segi kebijakan, jalan Tunjungan termasuk wilayah yang harus bebas PKL. PKL disana merupakan PKL yang tidak terdaftar di Pemerintah Kota Surabaya. Setiap kali telah ada penertiban tetapi PKL disana tetap tumbuh dengan subur.

3. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK

3.1. Faktor Ekonomi

Fu Chen Ho (1987) menyatakan bahwa perekonomian di kota yang lebih banyak berupa perekonomian modern dan industri menjadikan pembentukan sektor informal tidak bisa dihindarkan. Sektor ini merupakan akibat dari proses marjinalisasi masyarakat yang tidak terserap dalam sektor formal karena tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Selain itu juga karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah membuat pekerjaan ini menjadi pilihan karena kemudahan dan kesederhanaan persyaratannya, sehingga sektor ini merupakan "penyelamat" dalam mengakomodasi kebutuhan akan lapangan kerja. Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Tata Kota Surabaya (2004) bahwa keberadaan PKL meningkat secara signifikan pasca krisis ekonomi.

Selain itu juga karena PKL melayani berbagai lapisan masyarakat, dimana fasilitas tersebut tidak terakomodir pada pertokoan formal di jalan Tunjungan yang hanya melayani kelas tertentu dalam masyarakat. Sehingga secara tidak langsung sektor informal ini mendukung sektor formal yang ada.

3.2. Faktor Penggunaan Lahan

Konflik yang terjadi hanya di ujung utara jalan Tunjungan juga didukung oleh aktifitas penggunaan lahan yang berbeda antara jalan Tunjungan bagian utara, tengah dan selatan. Penggunaan lahan di ujung utara telah menyebabkan pedestrian banyak terdapat dibagian ini sehingga PKL pun banyak terdapat disini akibatnya konflik pun tidak bisa dihindarkan. Sedangkan dibagian tengah karena penggunaan lahannya, pedestrian jarang terdapat disini terlebih pada sore dan malam hari dimana kegiatan perkantoran disini telah tutup. Dibagian selatan kota tidak ada kegiatan masyarakat di sepanjang trotoarnya.

3.3. Faktor Kebijakan.

Kebijakan pelarangan kegiatan PKL di Tunjungan ini sulit diterapkan karena PKL disini telah ada cukup lama dan diakrabi warga. Akibat pelarangan tersebut, para PKL tidak terdaftar di Pemerintah Kota sehingga menjadikan PKL disana tumbuh dengan sendirinya dan tidak terkontrol.

3.4. Faktor Spasial

Sepanjang trotoar yang didominasi oleh naungan dengan deretan kolom (*portico*), menjadikan trotoar merupakan tempat yang nyaman untuk beraktifitas. Lebar trotoar sekitar 3 m didominasi oleh PKL yang menempati sekitar dua pertiganya, sehingga ruang yang tersisa bagi pedestrian menjadi kurang nyaman.

*Tampak PKL yang menempati
Dan "menguasai" trotoar sehingga
Mengganggu ruang gerak pedestrian*



3.5. Faktor Estetika Lingkungan.

Estetika di jalan Tunjungan ini menjadi menurun kualitasnya karena tampilan alat peraga yang terkesan kumuh dan apa adanya, selain juga jarak antar alat peraga yang tidak teratur mendukung konflik tersebut.

3.6. Faktor Perilaku

Konflik di Tunjungan terjadi karena PKL yang ada sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga tidak mematuhi peraturan Pemerintah Kota tentang larangan berdagang disana. Selain itu perilaku pedestrian yang membeli pada PKL disana semakin menyuburkan kondisi tersebut. Pada dasarnya PKL muncul jika ada keramaian masyarakat, sehingga keberadaan PKL di Tunjungan tidak bisa dicegah.

4. TEMUAN DAN REKOMENDASI

Sebagai ruang terbuka di pusat kota, jalan Tunjungan yang terkenal sebagai tempat masyarakat beraktifitas dan berinteraksi sosial hendaknya tetap dipertahankan dan dikembangkan. Dari beberapa faktor penyebab diatas maka dapat disimpulkan bahwa PKL di Tunjungan tidak dapat dilarang/ dihilangkan begitu saja, karena ada saling ketergantungan (*supply – demand*) antara PKL dan pedestrian. Kondisi ini dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan citra Tunjungan dan mengembalikan Tunjungan sebagai ruang terbuka kota untuk berbagai aktifitas. Konflik yang ada dapat diselesaikan dengan melakukan penataan PKL di sepanjang trotoar jalan Tunjungan. Penataan ini juga untuk menghidupkan sepanjang jalan tersebut baik pada siang hari maupun malam hari. Penataan dapat juga untuk meningkatkan estetika lingkungan sehingga menjadikan Tunjungan sebagai salah satu obyek wisata kota Surabaya.

Penataan antara lain dengan membuat aliran pedestrian dari utara ke selatan jalan Tunjungan dengan mengaktifkan pusat kegiatan berupa pertokoan yang ada di selatan Tunjungan. Sedangkan PKL dapat ditata di trotoar sepanjang jalan tersebut sehingga PKL tidak mengumpul hanya di sebelah utara Tunjungan. Dengan demikian sepanjang trotoar akan menjadi tempat beraktifitas masyarakat dan menghidupkan jalan Tunjungan baik siang maupun malam hari.

Kebijakan tentang pelarangan PKL di sepanjang jalan Tunjungan perlu ditinjau kembali. Pemerintah kota dapat mendaftarkan PKL secara administratif yang dapat digunakan membatasi dan mengendalikan jumlah PKL yang ada disana.

Untuk meningkatkan estetika lingkungan dengan cara menentukan standar bentuk alat peraga sehingga tampilan PKL secara keseluruhan lebih menyatu, menarik dan indah. Juga perlu ditentukan ukuran standar alat peraga agar tidak memenuhi trotoar sehingga pedestrian masih dapat berjalan dengan leluasa dan nyaman. Ketentuan lainnya adalah jarak antara alat peraga yang harus ada sehingga PKL tidak berjubel. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kota dapat memberikan dukungan finansial misalnya pemberian kredit yang meringankan agar penataan dapat terwujud dengan baik.

Pembinaan mental perlu dilakukan secara intensif meliputi pembinaan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan yang dapat dilakukan secara berkala. Perilaku tertib ini dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan paguyuban yang ada. Agar PKL tampil indah dapat dengan memperketat sanksi terhadap pelanggaran kebersihan dan ketertiban baik PKL maupun pedestrian dan sebaliknya yaitu memberi penghargaan kepada PKL yang tampil indah dan tertib.

Sebagai kelanjutan dari penataan ini, pemerintah kota dapat mempromosikan Tunjungan sebagai salah satu wisata kota yang dapat dibanggakan baik secara historis maupun penataannya.

DAFTAR PUSTAKA :

- Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surabaya, 1995, *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Segi Empat Tunjungan Surabaya*.
- Direktorat Perumahan, Dept. Pekerjaan Umum., 1986, *Laporan Akhir tentang Rencana Pelaksanaan dan Uji Coba penataan Pedagang kaki Lima dalam Rangka Perbaikan Lingkungan Kawasan Pusat Kota*.
- Fu Chen Ho dalam Nurmandi, Achmad.1999, *Manajemen Perkotaan*, Cetakan Pertama, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta.
- Hakim, Rustam dan Utomo, Hardi, 2003, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*, Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kepala Dinas Tata Kota Surabaya, 2004, *Penataan Ruang Kota Surabaya Dalam kaitannya Dengan Penyediaan Lahan Untuk Sektor Informal*, *Seminar Berseri dan Berpola Penataan PKL di Surabaya (seri II)*, harian Jawa Pos, 24 Januari 2004, Graha Pena Surabaya.
- Kerjasama Bappeda Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Puslit ITS.,1990, *Laporan Penelitian : Studi Pengembangan peremajaan Kota Terpadu*.
- Sardjito, 1989, *Laporan Penelitian "Alternatif Pemecahan Masalah Pedagang Kaki Lima pada Tata Ruang Fisik Kota" (Studi Kasus Wilayah Surabaya Selatan)*, ITS, Surabaya.
- Trancik, Roger, 1986, *Finding Lost Space*, Van Nostrand Reinhold, New York
- Zahnd, Markus,1999, *Perancangan Kota secara Terpadu*, Cetakan ke-5, Kanisius, Yogyakarta.